

**MODEL KEBIJAKAN PUBLIK
BERBASIS KEADILAN SOSIAL ISLAM**

Siti Apriliana Hasanah¹, Diana Dwi Yanti²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura,
Pamekasan, Indonesia

Email Korespondensi: ¹Anaahsnh18@gmail.com,

²dianadwiyanti162006@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketimpangan sosial dan belum optimalnya penerapan nilai keadilan dalam kebijakan publik, sehingga diperlukan suatu pendekatan alternatif yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam serta merumuskan model kebijakan publik berbasis keadilan sosial Islam yang relevan dengan konteks kebijakan modern. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik berbasis keadilan sosial Islam memiliki landasan pada prinsip al-‘adl, masalah, dan maqashid al-shariah yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Model kebijakan yang dihasilkan mencakup landasan normatif, proses perumusan yang partisipatif, implementasi yang berorientasi pada kemaslahatan, serta evaluasi yang mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Kesimpulannya, model kebijakan publik berbasis keadilan sosial Islam dapat menjadi alternatif dalam mewujudkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: kebijakan publik; keadilan sosial Islam; maqashid al-shariah; masalah; model kebijakan

ABSTRACT

This study is motivated by the persistence of social inequality and the suboptimal implementation of justice values in public policy, thus requiring an alternative approach capable of integrating social justice values comprehensively. This research aims to analyze the concept of social justice from an Islamic perspective and to formulate a model of public policy based on Islamic social justice that is relevant to the context of modern policy. The research employs a qualitative method with a library research approach, collecting data from various sources such as books, academic journals, and relevant documents. Data analysis is conducted descriptively and analytically through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that public policy based on Islamic social justice is grounded in the principles of al-‘adl (justice), masalah (public interest), and maqashid al-shariah, which emphasize the balance between individual and societal interests. The proposed policy model includes normative foundations, participatory policy formulation, implementation oriented toward public welfare, and evaluation based on social justice considerations. In conclusion, the Islamic social justice-based public policy model can serve as an alternative approach to creating policies that are more just, inclusive, and sustainable in society.

Keywords: public policy; Islamic social justice; maqashid al-shariah; masalah; policy model

Pendahuluan

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis dalam mengatur kehidupan masyarakat sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. dalam praktiknya, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut dalam suatu sistem pemerintahan. Namun demikian, berbagai kebijakan yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi persoalan serius seperti ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, serta distribusi kesejahteraan yang belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan publik yang ada masih cenderung bersifat teknokratis dan belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai keadilan sosial secara substantif (Hasan & Ali, 2023). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan baru yang tidak hanya menekankan efisiensi administratif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan sebagai tujuan utama kebijakan publik.

Dalam konteks tersebut, Islam sebagai sistem nilai yang komprehensif menawarkan konsep keadilan sosial yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip keadilan dalam Islam tercermin dalam konsep *al-'adl* (keadilan), *al-musawah* (kesetaraan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum), yang menjadi landasan dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang adil dalam setiap kebijakan yang diambil (Kamali, 2022). Dengan demikian, nilai-nilai keadilan sosial Islam memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

Urgensi pengembangan kebijakan publik berbasis keadilan sosial Islam semakin nyata ketika melihat berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat modern. Ketimpangan ekonomi, ketidakadilan akses terhadap layanan publik, serta marginalisasi kelompok rentan menunjukkan bahwa paradigma kebijakan yang digunakan belum sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial. Dalam hal ini, pendekatan berbasis nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat menjadi sangat penting untuk dikembangkan (Chapra, 2021). Selain itu, konsep *maqashid al-shariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memberikan kerangka yang komprehensif dalam merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh (Rahman, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam maupun relevansinya dalam kebijakan publik. Penelitian oleh Hasan dan Ali menunjukkan bahwa keadilan distributif dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Hasan & Ali, 2023). Sementara itu, penelitian oleh Ahmed menekankan bahwa integrasi nilai etika Islam dalam kebijakan publik dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Ahmed, 2021). Penelitian lain yang dilakukan oleh Farooq mengungkapkan bahwa kebijakan publik berbasis nilai Islam mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial (Farooq, 2022). Selain itu, Rosyadi dan Sulaiman menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik di Indonesia masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam suatu model yang sistematis (Rosyadi & Sulaiman, 2025).

Selain itu, kajian berbasis masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman memiliki peran penting dalam membentuk perilaku sosial masyarakat, khususnya dalam aspek 'ubudiyah

dan mu'amalah. Pemahaman keagamaan yang baik tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga mampu mendorong terbentuknya perilaku sosial yang adil dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari (Rozi et al., 2023). Penelitian tersebut menegaskan bahwa lembaga keagamaan seperti majlis ta'lim memiliki kontribusi besar dalam membangun kesadaran sosial masyarakat. Namun demikian, kajian tersebut masih terbatas pada level praksis masyarakat dan belum dikembangkan ke dalam ranah kebijakan publik secara lebih luas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara kajian normatif dan praksis keislaman dengan formulasi kebijakan publik yang berbasis keadilan sosial Islam.

Lebih lanjut, penelitian oleh Ismail menegaskan bahwa kebijakan publik yang tidak berbasis pada nilai keadilan cenderung menghasilkan kebijakan yang eksklusif dan tidak inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Ismail, 2023). Hal ini diperkuat oleh studi dari Huda yang menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai agama dalam kebijakan publik dapat memperkuat dimensi moral dalam tata kelola pemerintahan (Huda, 2022). Dengan demikian, kebutuhan akan model kebijakan publik yang berbasis nilai keadilan sosial Islam menjadi semakin penting sebagai upaya untuk menjawab tantangan sosial yang kompleks.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan alternatif solusi berupa pengembangan model kebijakan publik berbasis keadilan sosial Islam yang mengintegrasikan prinsip *maqashid al-shariah* dengan pendekatan kebijakan modern. Model ini dipilih karena mampu menjembatani antara nilai normatif Islam dengan kebutuhan praktis dalam perumusan kebijakan publik yang kontekstual dan aplikatif. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil secara sosial dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana merumuskan model kebijakan publik yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial Islam dalam konteks kebijakan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam, mengkaji relevansinya dalam kebijakan publik kontemporer, serta merumuskan model kebijakan publik berbasis keadilan sosial Islam secara konseptual. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang kebijakan publik Islam, sedangkan secara praktis dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan model kebijakan publik berbasis keadilan sosial Islam dalam penelitian ini adalah suatu kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, seperti *al-'adl*, *maslahah*, dan *maqashid al-shariah*, ke dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Definisi operasional ini digunakan untuk memberikan batasan yang jelas agar penelitian memiliki fokus yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep dan model kebijakan publik berbasis keadilan sosial Islam melalui kajian literatur serta interpretasi terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, serta konstruksi pemikiran yang berkembang dalam suatu fenomena sosial secara komprehensif (Creswell, 2014). Dengan

demikian, pendekatan ini dianggap paling tepat untuk menganalisis konsep normatif dan teoritis yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian penelitian berupa konsep, teori, dan model kebijakan publik berbasis keadilan sosial Islam yang banyak terdapat dalam sumber-sumber tertulis. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai pemikiran yang telah ada sehingga dapat ditemukan pola, hubungan, serta kesenjangan penelitian yang menjadi dasar dalam pengembangan model konseptual (Zed, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur utama yang berkaitan langsung dengan konsep keadilan sosial Islam, kebijakan publik, serta pendekatan *maqashid al-shariah*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, buku referensi, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan penelitian ini. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian serta kredibilitas sumber yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan mendukung tujuan penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran sumber secara daring melalui database jurnal ilmiah guna memperoleh referensi terbaru yang sesuai dengan perkembangan kajian kebijakan publik dan keadilan sosial Islam.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, serta menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen kunci karena memiliki peran aktif dalam memahami dan menafsirkan data yang diperoleh (Sugiyono, 2019). Untuk mendukung proses penelitian, peneliti juga menggunakan alat bantu berupa catatan dokumentasi dan perangkat digital untuk menyimpan serta mengelola data yang telah dikumpulkan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menemukan pola dan hubungan yang bermakna. Proses analisis ini dilakukan secara berulang hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan konsisten.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber literatur yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap sumber data yang digunakan untuk menghindari bias serta memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki validitas yang tinggi. Teknik ini penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Sugiyono, 2019).

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dari penentuan topik dan perumusan masalah, pengumpulan data melalui studi literatur, analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, hingga penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian. Dengan prosedur yang sistematis ini, diharapkan penelitian dapat dilakukan secara terarah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta memungkinkan untuk direplikasi oleh peneliti lain dengan pendekatan yang serupa.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan publik berbasis keadilan sosial Islam memiliki landasan normatif yang kuat serta relevansi yang tinggi dalam menjawab berbagai persoalan sosial kontemporer. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, ditemukan bahwa prinsip utama dalam kebijakan publik Islam terletak pada konsep keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta tujuan syariat (*maqashid al-shariah*) yang menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, 2022). Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan publik berbasis keadilan sosial Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi aplikatif yang dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dalam sektor ekonomi, misalnya, prinsip keadilan distributif menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Hal ini sejalan dengan temuan Hasan dan Ali yang menyatakan bahwa keadilan distributif dalam ekonomi Islam mampu mengurangi kesenjangan sosial secara signifikan (Hasan & Ali, 2023). Dengan demikian, kebijakan publik yang mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *maqashid al-shariah* memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara holistik. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek material, tetapi juga aspek moral dan spiritual dalam kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahman yang menegaskan bahwa kebijakan publik yang berbasis *maqashid al-shariah* mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (Rahman, 2024). Dengan demikian, pendekatan ini dapat dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam mengembangkan model kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan publik berbasis nilai Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek struktural maupun kultural. Secara struktural, kebijakan publik masih didominasi oleh pendekatan sekuler yang kurang mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dalam proses perumusannya. Sementara itu, secara kultural, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman nilai-nilai Islam di tingkat masyarakat dengan implementasinya dalam kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan temuan Rosyadi dan Sulaiman yang menyatakan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik di Indonesia masih bersifat parsial dan belum terstruktur secara sistematis (Rosyadi & Sulaiman, 2025).

Lebih lanjut, hasil penelitian ini memperkuat temuan dari kajian berbasis masyarakat yang menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku sosial yang adil dan seimbang. Pemahaman terhadap aspek ‘ubudiyah dan mu’amalah tidak hanya berdampak pada hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga pada hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari (Rozi et al., 2023). Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya diinternalisasikan dalam kebijakan publik secara luas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif Islam dengan implementasi kebijakan publik yang ada.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini memiliki kesamaan dalam menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam kebijakan publik, namun juga menunjukkan perbedaan dalam hal pendekatan yang digunakan. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif atau sektoral, seperti ekonomi Islam atau tata kelola pemerintahan, sedangkan penelitian ini mencoba mengintegrasikan berbagai aspek tersebut ke dalam suatu model kebijakan publik yang komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya kontribusi akademik dalam bentuk pengembangan model konseptual yang menggabungkan nilai-nilai keadilan sosial Islam dengan pendekatan kebijakan publik modern.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merumuskan model kebijakan publik berbasis keadilan sosial Islam yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu: (1) landasan normatif yang bersumber dari nilai-nilai Islam seperti *al-‘adl* dan *maqashid al-shariah*, (2) proses perumusan kebijakan yang partisipatif dan inklusif, (3) implementasi kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum, serta (4) evaluasi kebijakan yang mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Model ini diharapkan dapat menjadi kerangka kerja yang aplikatif dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih adil dan berkelanjutan.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah penguatan konsep kebijakan publik Islam sebagai disiplin ilmu yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Sementara itu, implikasi praktisnya adalah memberikan alternatif bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam upaya mewujudkan kebijakan publik yang berkeadilan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model kebijakan publik berbasis keadilan sosial Islam merupakan suatu pendekatan yang memiliki landasan konseptual yang kuat serta relevansi yang tinggi dalam menjawab berbagai permasalahan sosial kontemporer. Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip utama dalam Islam seperti keadilan (*al-‘adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta tujuan syariat (*maqashid al-shariah*) yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan ekonomi semata, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan spiritual yang menjamin terciptanya kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi nilai-nilai keadilan sosial Islam ke dalam kebijakan publik dapat dilakukan melalui beberapa komponen utama, yaitu landasan normatif berbasis nilai Islam, proses perumusan kebijakan yang partisipatif dan inklusif, implementasi

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 51 – 58.

kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum, serta evaluasi kebijakan yang mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Model ini menunjukkan bahwa kebijakan publik berbasis nilai Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki potensi aplikatif dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian kebijakan publik Islam dengan menawarkan model konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pendekatan kebijakan modern. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan alternatif bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai keadilan sosial Islam dalam kebijakan publik dapat menjadi solusi dalam mengurangi ketimpangan sosial serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang bergantung pada data sekunder sehingga belum menggambarkan secara langsung implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris untuk menguji model yang telah dirumuskan dalam konteks nyata, baik melalui studi kasus maupun penelitian lapangan. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan model kebijakan publik berbasis keadilan sosial Islam pada sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, ekonomi, atau pemerintahan daerah agar lebih aplikatif dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal dalam pengembangan model kebijakan publik yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berkeadilan sosial serta selaras dengan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih disampaikan kepada institusi pendidikan yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama proses penelitian berlangsung.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang konstruktif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dan penulis terdahulu yang karyanya menjadi referensi penting dalam penyusunan penelitian ini. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan, bantuan, dan kontribusi yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 51 – 58.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Habib. 2021. *Islamic Ethics and Public Policy*. London: Routledge.
- Chapra, M. Umer. 2021. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition. California: SAGE Publications.
- Farooq, Mohammad Omar. 2022. "Islamic Public Policy and Social Justice." *Journal of Islamic Studies*, Vol. 14 No. 2.
- Hasan, Zubair & Ali, Salman. 2023. "Islamic Social Justice and Economic Distribution." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 15 No. 2.
- Huda, Nurul. 2022. "Religious Values in Public Governance." *Jurnal Administrasi Publik Islam*, Vol. 8 No. 1.
- Ismail, Faisal. 2023. "Public Policy and Social Inequality." *International Journal of Public Policy*, Vol. 9 No. 1.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2022. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Herndon: IIIT.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd Edition. California: SAGE Publications.
- Rahman, Fazlur. 2024. "Public Policy and Maqasid al-Shariah Approach." *International Journal of Islamic Governance*, Vol. 6 No. 1.
- Rosyadi, Imron & Sulaiman. 2025. "Model Kebijakan Publik Berbasis Nilai Islam di Indonesia." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 10 No. 1.
- Rozi, Mohammad Fahrur, Suhaimi, & Jamiliya Susantin. 2023. "Manajemen Majelis Ta'lim dalam Meningkatkan Pemahaman 'Ubudiyah dan Mu'amalah." *Kariman*, Vol. 11 No. 1.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, Mestika. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.